



Transformasi Media Digital dan Moderasi Beragama: Fenomena Politisasi Agama di Indonesia

Ahmad Zaky Nauval¹, Tri Achmad Tommy Sinambela², Khairiyah Ramadhani³

^{1,2,3} Constellation Legal Research Medan

zakynauval1@gmail.com

Korespondensi penulis: zakynauval1@gmail.com

Abstract: Indonesia is a multicultural country, so if you look at it, an approach in religion that emphasizes tolerance, mutual respect and open dialogue between various religions and beliefs is needed. In the political context, freedom of religion and belief can serve as a tool to prevent the politicization of religion. The politicization of religion seems to be the target of political contestation in Indonesia with digital media being its weapon that forms a polarization. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The selection of this method is based on the purpose of the research, which is to understand the reality of the implementation of elections, the strengthening of religious politicization in Indonesia. The results of scientific work show that the Government of Indonesia can elaborate with digital media in developing freedom of religion and belief as an effort to prevent the politicization of religion that has been polarized.

Keywords: Religious Moderation, Politicization of Religion, Social Media Polarization

Abstrak : Indonesia merupakan negara yang multikultural maka jika melihat hal tersebut pendekatan dalam beragama yang menekankan pada sikap toleransi, saling menghormati dan dialog yang terbuka antara berbagai agama dan keyakinan sangat dibutuhkan. Dalam konteks politik, kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat berfungsi sebagai alat pencegahan politisasi agama. Politisasi agama seakan menjadi sasaran dalam kontestasi politik di Indonesia dengan media digital menjadi senjatanya yang membentuk sebuah polarisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami realitas pelaksanaan pemilu, menguatnya politisasi agama di Indonesia. Hasil karya ilmiah menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dapat berelaborasi dengan media digital dalam mengembangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai upaya pencegahan politisasi agama yang sudah terpolarisasi.

Kata Kunci : Moderasi Beragama, Politisasi Agama, Polarisasi Media Sosial

1. PENDAHULUAN

Kontestasi politik diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik warga Negara yang diatur dalam undang-undang, yaitu hak kebebasan untuk memilih dan dipilih tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Salah satu karakteristiknya yakni partisipasi masyarakat, baik partisipasi yang resmi diatur oleh pemerintah maupun partisipasi yang tidak resmi. Akan tetapi ruang partisipasi tersebut dipolitisasi oleh kelompok-kelompok atas dasar identitas dalam masyarakat. Hal ini sesungguhnya berpeluang dalam melemahkan nilai demokrasi dan menjerumus kepada perpecahan.

Pergelaran kontestasi politik 2024 akan menjadi ajang merebut suara kaum generasi milenial dan Generasi Z. Menurut data Komisi Pemilihan umum jumlah pemilih dari generasi milenial sebanyak 66.822.389 atau 33,60% sedangkan generasi Z sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85% yang jika diakumulasikan, total pemilih dari kelompok

generasi milenial dan generasi Z berjumlah lebih dari 113 juta pemilih atau 56,45%.

Melihat data diatas, Pemilu 2024 akan diwarnai oleh hadirnya para pemilihbaru yang erat kaitannya dengan keberadaan sosial media. Oleh karena itu, platform digital akan menjadi senjata dalam memberi informasi-informasi mengenai Pemilu hingga kampanye akan didistribusikan. Hadirnya platform digital sebagai sumber informasi terkait Pemilu tidak menutup kemungkinan munculnya kesimpangsiuran (disinformasi) dan hoax yang akan menimbulkan polarisasi. Polarisasi melalui media digital dinilai akan menjadi tantangan terbesarIndonesia di Kontestasi Politik 2024.

Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi politik oleh suatu kelompok, institusi atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan atau mempertahankan kekuasaan. Sementara itu yang dimaksud dengan identitas yakni kategori sosial dimana orang-orang yang ditempatkan pada satu kategori yang sama. Politisasi identitas artinya identitas yang dipolitisasi untuk mendapat dukungan dari identitas yang sama baik suku, adat, ras, dan agama dengan pendekatan atau interpretasi politik. Akibatnya ketika identitas-identitas yang muncul saling bertentangan dan Negara tidak mampu untuk mendamaikannya maka akan menyebabkan konflik yang terjadi di masyarakat. (Frenki, 2021)

Mayoritas masyarakat Indonesia memiliki rasa sensitivitas agama yang sangat tinggi, sehingga mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang berbau agama, dengan warna agama yang sama diharapkan pendekatan mobilisasi pemilih dapat digunakan dengan mudah. Maka tidak heran jika para kandidat lebih cenderung terfokus memobilisasi pemilih yang menganut agama sama dengan dirinya.

Politisasi agama seakan menjadi sasaran dalam kontestasi politik di Indonesia dengan media digital menjadi senjatanya yang membentuk sebuah polarisasi. Polarisasi ini terlihat melalui opini publik di media digital yang semakin terbelah, sebenarnya media tidak hanya memberi tahu masyarakat mengenai isu yang harus difikirkan, tetapi juga bagaimana bertindak terhadap isu tersebut. Hal inilah yang menjadi ancaman bagi kesatuan Negara, terutama menjelang pemilihan umum ketika media sosial berpeluang menyisipkan kepentingan politik tertentu dalam pemberitaanya.

Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak dasar warga negara Indonesia yang telah dilindungi oleh undang-undang dasar 1945. Selain itu, hak memeluk agama atau kepercayaan merupakan hak asasi yang bersifat hakiki dan universal, melekat pada diri manusia sejak ia dilahirkan. Sejatinya kebebasan memeluk agama dan keyakinan

merupakan hak yang dijamin oleh banyak instrumen, namun realitanya dalam kontestasi politik agama dan keyakinan antar sesama sering dibenturkan untuk mendapat simpati. Maka sudah tentu pemahaman terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) sangat diperlukan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami realitas pelaksanaan pemilu, menguatnya politisasi agama di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui verifikasi data primer dan data sekunder (Safrilsyah Syarif, 2013). Data yang digunakan adalah karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku dan artikel-artikel jurnal terkait pemilu, politisasi agama dan menguatnya polarisasi di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Benang Hubung Moderasi Beragama dan Politik

Moderasi beragama adalah sebuah sikap yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Moderasi beragama bisa menjadi kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. (Moderasi Beragama, 2019)

Islam misalnya mengenal moderasi beragama dengan *Wasathiyah*, dalam pengertiannya merujuk kepada Q.S al-Baqarah ayat 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّعَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) “umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang berbalik kebelakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.

Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha pengasih, Maha penyayang kepada manusia. (Quran Asy- Syifaa',2019)

Menilik hubungan antara moderasi beragama dan politik adalah dengan melihat keterlibatan agama dan keyakinan dalam politik serta hubungan agama dan keyakinan dengan Negara. Moderasi beragama dinilai mampu untuk menyesuaikan rincian politik dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatannya sambil memperhatikan dasar-dasar ajaran kemanusiaan.(Shihab, 2019)

Catatan akhir tahun Tahun koalisi advokasi KBB mengatakan bahwa tahun 2024 penting menjadi perhatian bersama mengingat ini adalah tahun politik. Pertama, potensi konflik kekerasan bisa bereskalasi apabila ujaran kebencian atau diskriminatif terhadap kelompok keagamaan tertentu digunakan dalam kampanye pemilu. Di antara yang rentan menjadi sasaran kampanye bermuatan ujaran kebencian adalah kelompok minoritas keagamaan yang tanpa Pemilu-pun, dalam beberapa kasus, sudah mengalami berbagai keterbatasan. Di sisi lain, penegakan hukum pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan penggunaan pasal ujaran kebencian untuk mengkriminalisasi mereka yang kritis maupun beroposisi terhadap Pemerintah. Tindakan nondiskriminatif dari Pemerintah dan aparat 7 keamanan diperlukan untuk dua hal:

(1) perlindungan kelompok minoritas serta rentan sedini mungkin dan

(2) mencegah kriminalisasi untuk kepentingan politik yang berkuasa. Segenap pemangku kepentingan masyarakat sipil juga perlu lebih giat melakukan upaya-upaya pemantauan, dialog dan kampanye yang menjamin penghormatan, perlindungan dan jaminan akan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan serta tidak digunakannya penegakan hukum untuk kriminalisasi orang yang kritis maupun yang beroposisi dalam konteks ini. (catatan akhir tahun koalisi advokasi KBB tahun 2023)

Paradigma Politisasi Agama dalam Kontestasi Politik di Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang *Multikulturalisme* dimana terdapat begitu banyak etnis, bangsa, agama, keyakinan, subkultur dan lainnya, perbedaan ini diibaratkan sebagai jenis-jenis bunga yang mekar dalam taman yang kehadirannya makin memperindah dan mengasrikan taman. (Lubis, 2015) dalam realitas kehidupan Indonesia mayoritas agama ialah Islam, namun tetap ada berberapa keyakinan agama lain yang juga dianut banyak masyarakat di Indonesia yakni Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu juga keyakinan-

keyakinan masyarakat lainnya.

Keanekaragaman yang menghiasi Indonesia dalam sejarahnya juga menimbulkan beberapa gejala-gejala negatif, sensitivitas terhadap agama yang tinggi hingga mudah dihasut untuk persoalan-persoalan intoleransi dan radikalisme. Dalam beberapa tahun politik terakhir hal inilah yang dijadikan elit politik untuk mengamankan atau merebut kekuasaan atau biasa disebut “politisasi agama”. Dalam pandangan sudut tilikan, sebenarnya tidak mungkin agama keyakinan mengajarkan permusuhan dengan kelompok-kelompok lain, dalam pandangan ini agama dan keyakinan ditempatkan pada langit-langit suci yang sama sekali tidak tersentuh oleh nafsu-nafsu kotor atau carut marut pergerakan sosial dan perebutan kekuasaan. Agama atau keyakinan dipandang sebagai ajaran yang selalu membawa perdamaian, keadilan, penghormatan dan nilai-nilai kebaikan lainnya.

Setiap agama dan keyakinan mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghargai, berbuat baik, mengutamakan kasih sayang dan adil, bukan hanya kepada sesamanya saja melainkan juga kepada semua umat manusia termasuk orang-orang tidak beragama dan berkayinan sama dengannya.

Agama dan keyakinan manapun tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama, tidak mengusir Namun seakan tidak acuh terhadap ajaran berbuat baik dan adil, dalam prakteknya begitu banyak terjadi politisasi agama yang diarahkan menjadi senjata untuk mempengaruhi masyarakat untuk membenci satu golongan tertentu atas dasar kesamaan identitas agama, hal-hal tersebut sudah tersebar luas disetiap masatahun politik di Indonesia yang digencarkan melalui *buzzer* dan *Artificial Intelligence* (AI) dalam membentuk sebuah polarisasi di media digital. Hal ini membuat dampak buruk dimasyarakat seperti putusnya silaturahmi bahkan sampai kepada perbuatan pidana yaitu “pembunuhan”.

Pengaruh Polarisasi Politisasi Agama di Media Digital

Politisasi agama mencapai titik kluminasinya bermula pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017, pada masa itu Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam pidatonya di kepulauan seribu, Ahok menyinggung ayat al-Quran, hal ini menyebabkan kemarahan umat islam hingga melaporkan ucapan Ahok sebagai penistaan agama.

Dalam proses persidangan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, diwarnai oleh

gerakan-gerakan damai umat islam, bermula dari aksi damai 411 sampai kepada puncaknya aksi damai 212, dimana jutaan umat muslim berkumpul dengan damai membawa tuntutan agar Ahok diadili dengan semestinya, aksidamai ini menjadi saksi bisu gerakan baru dalam menyampaikan ekspresi dimuka umum. (Tanjung & Iswandi, 2017)

Aksi damai 212 yang sebenarnya dapat menjadi rujukan bagi peradaban islam dunia, dimana aksi ini dilakukan dengan hati yang panas namun fikirantetap dingin ini banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menjadikan aksi ini menjadi politisasi agama, hingga lahirlah aksi-aksi tandingan. Pro dan kontra aksi ini terus berkembang hingga tidak sedikit konflik yang terjadi, banyak wajah-wajah politisi yang hadir dari kedua aksi yang bersebrangan ini menjadikan arena perang argumen dari setiap pendukungnya di media digital, tak jarang saling fitnah bahkan caci maki dilontarkan dari masing-masing pendukung.

Selain itu, pemilihan presiden tahun 2019 juga tidak terlepas dari politisasi agama, dimana Joko widodo yang saat itu dikenal di media digital sebagai orang yang “awam” tentang islam menggandeng K.H Ma'ruf Amin yang merupakan seorang ketua Majelis Ulama Indonesia, begitu juga dengan pesaingnya Prabowo Subianto yang mengandalkan kedekatannya dengan FPI dan Ijtima' Ulama, semua dilakukan untuk merebut suara dari pemilih muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Istilah “cebong” dan “kampret” juga tagar #2019gantipresiden dan #2019tetapjokowi terus beredar di media sosial bahkan tidak sedikit konten berisi hoaks tentang hal tersebut, hal inilah yang membuat masyarakat terus terpolarisasi, sudut pandang masyarakat dikendalikan oleh algoritma media digital yang diatur oleh *Artificial Intelligence* (AI).

Polarisasi adalah metode yang digunakan untuk menarik atensi kita sebagai pengguna media digital. AI (*artificial intelligence*) yang diprogram pada sosial media menggunakan *machine learning* model, yang membaca kegiatan media kita lalu dikotomi menurut hal yang kita sukai dan minati yang bertujuan agar kita menghabiskan waktu yang lama di media digital tersebut. Informasi yang diperoleh seseorang dari jejaring media digital ini dapat dikatakan sedari awal bersifat sangat bias, informasi-informasi yang tersaji ke linimasa seseorang khususnya yang bersangkutan dengan sosial-politik akan selalu seirama dengan jalan pikiran sang pengguna. (Budiman & Halya , 2019)

Sebagai contoh dalam pemilihan presiden ada dua kandidat yang akan bersaing yaitu A dan B, jika seseorang tertarik pada kandidat A, awalnya ia tak memiliki kebencian terhadap kandidat B, ketertarikan seseorang tersebut kepada kandidat A akan dibaca oleh AI, maka AI akan memberikan konten-konten yang akan membuat orang tersebut akan semakin tertarik dengan kandidat A, dan pada tahap selanjutnya, AI akan memberikan konten-konten negatif tentang kandidat B agar seseorang tersebut semakin tertarik dengan kandidat A dan membenci kandidat B hingga sampai ke tingkat ‘fanatik’, seperti inilah algoritma polarisasi berjalan di media digital.

Dampak negatif dari polarisasi terhadap politik sangat berbahaya dan tampak dengan jelas, di Sampang Madura, seorang warga tewas ditembak oleh temannya sendiri karena berbeda pilihan terkait calon presiden yang diawali saling kecam di media sosial. Di Yogyakarta, markas FPI diserang oleh ormas tentara langit familia saat konvoi kemenangan salah satu calon presiden. Bahkan data BBC mencatat ada 21.193 kasus perceraian terkait politik setahun setelah kontestasi politik 2019. (Data *British Broadcasting Corporation*)

Keadaan inilah yang menjadi titik tolak bahwa pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat diperlukan dan pemerintah mempunyai peran penting dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah harus menjamin kebebasan masyarakatnya dan jangan menjadi pemecah belah masyarakatnya. Maka sangat diperlukan sikap moderat dan tidak fanatik terhadap suatu hal, bahkan kita seharusnya tidak saling mencaci, memfitnah, bahkan saling bermusuhan satu sama lain karena berbeda agama atau keyakinan.

Subliminal Media Sosial Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Mencegah Politisasi Agama

Pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi kontestasi politik haruslah bersikap moderat dengan memandangnya sebagai wilayah profan yang terbuka bagi semua pihak tanpa memandang identitas keagamaan ataupun keyakinan. (Masturi, Malik, & Abidun, 2011) Sejarah perpolitikan Indonesia mencatat bahwa ketika pembuatan piagam Jakarta salah satu poinnya semula berisi “Ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Perubahan ini terjadi setelah diskusi panjang para tokoh sebagai upaya agar tidak terjadi perpecahan diantara warga Negara lainnya.

Pemahaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti inilah yang seharusnya mengisi popularisasi media digital, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI harus berusaha semaksimal mungkin dalam menggemakan moderasi agama ditengah kontestasi politik yang akan dihadapi tahun 2024 ini. Jika merujuk sumber di Internet anggaran kementerian agama untuk moderasi beragama cukup besar berjumlah 3,2 Triliun, maka dilihat dari angka ini seharusnya pemahaman moderasi beragama dapat diiklankan di media sosial yang akan menjangkit masyarakat Indonesia sebagai upaya pencegahan politisasi agama.

Maka sudah seharusnya pemerintah segera melakukan pembangunan pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan, pembangunan tersebut dimulai dari keadilan. Keadilan yang sudah diaplikasikan nantinya akan menimbulkan rasa toleransi antar sesama, ketika toleransi sudah tertanam maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam konsep menggemakan moderasi beragama menggunakan media digital dengan memasukkan pesan-pesan subliminal disetiap informasi media digital pemerintahan sebagai upaya pencegahan politisasi agama yang mengancam kesatuan bangsa pada kontestasi politik tahun 2024.

“Apa yang harus dilakukan”

Dalam hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yaitu:

1. Komunikasi dan Dialog : Pemerintah dapat menjalin hubungan dan memfasilitasi dialog antar kelompok beragama dan keyakinan untuk membangun pemahaman dan rasa saling menghormati.
2. Pemanfaatan Media Digital : Pemerintah dapat memanfaatkan penggunaan media sosial untuk menyebarkan pemahaman kebebasan beragama. Pemerintah juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengembangkan kebijakan dan algoritma yang mendorong kebebasan Beragama dan berkeyakinan.

“Siapa yang dilibatkan?”

Penting untuk diingat bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat dan individu.

“Media apa yang digunakan?”

Pemerintah dapat mempublikasikan informasi dan materi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui situs web dan media digital. Semua sarana diatas dapat dimuat dan dibungkus dengan pendekatan-pendekatan yang menarik melalui media digital, sebab zaman ini media dan sarana yang terbaik ialah “media digital”. Namun penting bagi pemerintah untuk melakukan pemahaman yang sama terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan berbagai unsur masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah suatu konsep dimana setiap orang bebas memeluk dan meyakini apa yang dipercayainya. Dalam beragama dan berkeyakinan kita harus menekankan pada sikap toleransi, saling menghormati dan dialog yang terbuka antara berbagai agama tujuannya berbeda-beda. Dalam konteks politik, pemahaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat berfungsi sebagai alat pencegahan politisasi agama. Politisasi agama terjadi ketika agama dipergunakan untuk tujuan politik, misalnya untuk memperoleh kekuasaan atau untuk memobilisasi massa yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas Negara serta merusak hubungan umat antar beragama.

Media digital menjadi salah satu platform yang paling rentan terhadap politisasi agama, karena mudahnya penyebaran informasi dan pengaruh yang sangat besar membentuk opini publik. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang mereka terima di media sosial dan menghindari penyebaran informasi yang bersifat intoleran dan memecah belah.

Sebab sebenarnya, Agama-agama seperti Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu atau lainnya dan keyakinan-keyakinan bukanlah minoritas melainkan ‘Diversity’, bahwa itulah realitas kehidupan, sebesar apapun kehendak untuk membuat dunia itu sama maka tidak akan berhasil.

Pemerintah sudah harusnya bertanggung jawab menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, menjaga stabilitas keamanan politik dengan meyakini konsep kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan melibatkan semua unsur pihak dan tidak menjadikan

agama dan keyakinan sebagai alat politik namun sebagai kekayaan Indonesia. Sebab agama dan keyakinan merupakan hak semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Albani, M. S. (2022). *Falsafah Tasawuf untuk Orang Awam*. Jakarta: Renada.

Bagir, Z. A., & Sormin, J. M. (2022). *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama (Suatu Tinjauan Kritis)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Budiman, F., & H. N. (2019). Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial. *Penelitian dan Komunikasi Pembangunan*, 111.

Catatan Akhir Tahun Koalisi Advokasi KBB 2023

Data *British Broadcasting Corporation*

Frenki. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *Journal of Constitutional Law*, 1, 30.

Lubis, A. Y. (2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.

M. I., M. S., & A. Z. (2011). Mukaddimah. Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Quran Asy-Syifaa'. (2019). Bandung: Sygma corp.

RI, K. A. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

Shaleh, Q., Dahlan, & M. D. (1996). *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro Bandung.

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyah (Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama)*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.

Tanjung, A. D., & I. S. (2017). *Aksi Bela Islam 212 Gerakan Hati Kekuatan Bangsa*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.